

BAB VI

KESIMPULAN DAN PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penegasan, penerimaan, dan pengakuan dari sesama merupakan impian naluriah seorang manusia dalam kekerdilan jiwanya dihimpit rimba raya kepentingan manusia lain. Motivasi untuk bertahan (*survive*) dan tetap hidup mengkonstruksi gagasan dasar munculnya perang atau konflik. Pada masyarakat pluralis seperti Indonesia, konflik menjadi sulit dihindari manakala setiap kelompok masyarakat yang diikat oleh identitas tertentu merasa terancam, baik melalui penerapan sebuah kebijakan maupun perilaku kelompok masyarakat lain yang hidup berdampingan. Kondisi ini biasa-biasa saja *alias* tidak ada yang istimewa, karena kebijakan pemerintah tidak mungkin bisa menyenangkan semua pihak, dan kehadiran kelompok lain tidak selamanya bisa diterima. Artinya, konflik tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pluralis. Bahkan dalam kehidupan manusia secara umum pun, baik sebagai individu maupun kelompok, konflik tetap menjadi bagian yang integratif.

Tulisan ini bukan hanya melihat konflik sebagai bagian yang integratif dalam hidup manusia, tetapi lebih jauh memahami konflik sebagai instrumen yang bisa dipakai untuk mendorong terciptanya perubahan sosial. Konflik sebagai sebuah upaya untuk merebut atau mendapatkan kembali harga diri identitas yang hilang akibat pelecehan dan penghinaan kelompok identitas lain. Selain itu, konflik juga mengingatkan pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke jati dirinya masing-masing. Komunitas etnis Melayu Sambas di Kalimantan Barat merasa harga diri dan identitas ke-Melayu-annya diinjak-injak, dihina dan dilecehkan

komunitas etnis Madura melalui berbagai tindak kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga sebagai bentuk perlawanan dan sekaligus pelajaran kepada pihak Madura, pihak Melayu membantai dan mengusir Madura dari wilayah Kabupaten Sambas. Tragedi kemanusiaan atau yang sering dikenal, konflik tahun 1999 itu merupakan upaya maksimal pihak Melayu untuk mendapatkan kembali harga diri sebagai Melayu dan identitas obyektifnya sebagai tuan tanah atau penduduk setempat. Sebaliknya bagi pihak Madura, konflik 1999 merupakan peringatan keras terhadap berbagai tindakan tercela yang mereka lakukan sebelumnya, dan sekaligus mengembalikan mereka pada posisinya sebagai pendatang yang harus menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat setempat.

Sebatas kesadaran untuk kembali ke jati diri masing-masing pasca konflik bukanlah sebagai tujuan akhir dari proses afirmasi karena afirmasi mengandaikan adanya penerimaan dan penegasan kembali yang bersifat intersubyektivitas. Pihak Melayu menerima dan mengakui keberadaan pihak Madura dengan seluruh keunikannya, dan sebaliknya pihak Madura menerima dan mengakui keberadaan pihak Melayu dengan seluruh identitas ke-Melayu-annya yang khas. Tindakan saling menerima dan mengakui berangkat dari pemahaman dasar bahwa pihak Melayu sungguh-sungguh menyadari identitas ke-Melayu-annya karena kehadiran pihak Madura dan sebaliknya, pihak Madura sungguh-sungguh menyadari identitas ke-Madura-annya karena kehadiran identitas lain, seperti Melayu misalnya.

Pengakuan yang bersifat intersubyektivitas pasca konflik merupakan dambaan semua pihak, terutama orang-orang yang tidak menghendaki konflik, namun kenyataan di lapangan menunjukkan, baik pihak Melayu maupun Madura masih berada di tahap kesadaran. Masing-masing pihak menyadari bahwa mereka telah berkonflik yang mengakibatkan hilangnya jiwa dan harta benda. Secara normatif mereka menyesali apa yang telah terjadi dan berharap agar peristiwa yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Sebagian besar masyarakat telah melangkah ke tahap perbaikan, terutama berkaitan dengan pembenahan sikap dan penilaian

terhadap masing-masing pihak. Pihak Melayu menilai Madura tidak semuanya jahat, ada pula yang baik dan mampu menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat setempat. Sebaliknya, pihak Madura menilai Melayu tidak semuanya dendam, ada pula yang baik dan mau menerima Madura kembali ke Sambas. Lebih dari itu, pihak Melayu maupun Madura, termasuk Dayak dan etnis lain di Kalimantan Barat telah berupaya mengembangkan mekanisme antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya konflik susulan (*lihat. mekanisme antisipatif konflik di bab 4*), namun belum melangkah ke tahap afirmasi.

Semua proses itu merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tahap afirmasi atau penegasan diri identitas di tengah identitas lain. Sekalipun saat ini masyarakat masih berada pada tahap penyadaran, penyesalan dan upaya perbaikan, di masa yang akan datang tetap terbuka kemungkinan untuk mencapai tahap afirmasi. Untuk mencapai tahap ini memang tidak mudah, membutuhkan strategi tertentu guna mendorong dan mengoptimalkan kondisi yang ada sekarang. Afirmasi bukan sekadar mengantisipasi terjadinya konflik susulan, dengan menahan emosi massa masing-masing pihak, tetapi juga membangun relasi personal maupun kolektif, mensharingkan perbedaan yang melahirkan kedengkian dan membangun masa depan secara bersama-sama. Afirmasi bukan sekadar mengakui perbedaan masing-masing, tetapi juga mengelolah perbedaan untuk membangun kebersamaan. Afirmasi bukan sekadar mentransformasi konflik, tetapi juga menggunakan konflik sebagai alat atau instrumen untuk menciptakan perubahan yang dikehendaki bersama. Di sini tidak ada lagi kelompok masyarakat yang merasa was-was, takut, dan terancam akan kehilangan harga diri dan identitas. Semua kelompok masyarakat diikat oleh tujuan bersama, yakni memelihara kedamaian dan keharmonisan.

Dalam kondisi *mandeg*-nya masyarakat pada tahap penyadaran, penyesalan, dan perbaikan pasca konflik, pembahasan mengenai rekayasa sosial, baik melalui rekayasa pengalaman traumatik maupun rekayasa kebijakan menjadi relevan. Rekayasa sosial pasca

konflik dimungkinkan ketika ditemukan titik-titik simpul yang menyatukan kepentingan pihak-pihak yang bertikai. Selain itu, fakta-fakta yang bertentangan atau saling berhadapan yang membuat pihak-pihak yang bertikai saling bermusuhan direkayasa menjadi sebuah potensi untuk membangun kesadaran saling membutuhkan dan tergantung satu dengan yang lain. Untuk melakukan hal ini dibutuhkan keterlibatan pihak lain (baca: aktor-aktor rekayasa). Namun keterlibatan pihak lain hanya sebatas memfasilitasi berkembangnya mekanisme internal masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya konflik susulan. Para aktor rekayasa tidak memposisikan diri sebagai pengambil keputusan karena yang mengambil keputusan adalah masyarakat sendiri, khususnya pihak-pihak yang bertikai.

Berkaitan dengan peran para aktor rekayasa sosial, yaitu pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama (tokoh masyarakat), para akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat biasa yang menghendaki perdamaian, penulis mengajukan beberapa catatan yang patut dicermati.

Pertama, konflik internal negara, khususnya yang dilatarbelakangi perbedaan identitas etnis, termasuk agama seperti terjadi di Kabupaten Sambas tahun 1999 sangat membutuhkan peran mekanisme tradisional. Mekanisme tradisional yang direpresentasikan tokoh adat dan tokoh agama (yang sungguh-sungguh bertindak atas kepentingan masyarakat banyak) harus diberi peran, baik sebelum konflik maupun sesudah konflik. Hal ini penting dan sangat strategis karena konflik internal negara umumnya terkait erat dengan persoalan-persoalan yang bersifat primordial, seperti etnis, suku, agama, adat-istiadat, bahasa, dll. Persoalan-persoalan ini tidak bisa didalami dan diselesaikan melalui kebijakan formal yang bersifat taktis-mekanistik dari pemerintah karena sudut pandangnya berbeda. Konsep keadilan yang dipahami seorang pejabat publik kerap kali berbeda dengan keadilan yang dirasakan dan dipahami seorang tokoh adat masyarakat setempat. Sebagai contoh, bagi polisi dan pemerintah umumnya; setiap pelaku tindak kejahatan harus dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Itu baru adil. Namun

bagi tokoh adat Dayak misalnya, tindakan yang adil buat pelaku kejahatan adalah menghukum sesuai dengan kerusakan yang dialami korban. Jika akibat kejahatan itu korban meninggal dunia maka pelaku pun harus mati. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keseimbangan alam, dalam pengertian, darah yang tertumpah harus diganti. Di sini nampak sangat tidak manusiawi, nyawa ganti nyawa. Namun persoalannya, bukan manusiawi atau tidak manusiawi, tetapi mematuhi tradisi nenek moyang atau tidak. Meskipun tata ada semacam ini telah banyak mengalami perubahan sampai hari ini, di mana darah manusia bisa diganti darah binatang, hilang anggota tubuh bisa diganti uang karena setiap anggota tubuh punya harga tersendiri, dsb, namun konsep dasar keadilan tetap eksis, yakni menciptakan keseimbangan.

Kedua (*masih ada kaitan dengan yang pertama*), konflik yang dilatarbelakangi persoalan-persoalan primordial, khususnya di Indonesia umumnya berawal dari tindak kriminal atau kejahatan biasa. Misalnya, mabuk mengganggu orang lain, mencuri, mencopet, dsb, kemudian dipukul, dikeroyok sampai babak belur, bahkan sampai mati. Kemudian keluarga atau kelompok korban ingin balas dendam dan melakukan penyerangan, dan seterusnya, sampai akhirnya pecah konflik besar. Penanganan terhadap kasus ini nampaknya gampang-gampang saja; pelaku ditangkap kemudian diproses secara hukum dan dimasukkan ke dalam penjara, selesai. Namun kenyataannya tidak semudah itu, apalagi kalau polisi terindikasi menerima suap dari pelaku seperti terjadi pada insiden pertama dalam konflik Sambas. Tindakan kriminal atau kejahatan biasa, dalam pengertian, tidak ditarik ke isu primordial, seperti etnis, suku, agama, adat-istiadat, dll, mungkin mudah di selesaikan. Tetapi kalau kejahatan terjadi lintas-etnis, lintas-agama, lintas-suku dan secara sengaja atau tidak sengaja ditarik ke isu-isu primordial maka sudah bisa dipastikan, masalah itu akan menjadi rumit dan sulit diselesaikan. Lebih celaka lagi misalnya, tindakan kejahatan lintas identitas primordial terjadi ketika masyarakat sedang dalam kondisi was-was, takut, dan merasa terancam. Dalam kondisis ini sangat rawan terjadinya gesekan atau konflik.

Berbagai kasus konflik di wilayah Kalimantan Barat hampir semuanya diawali tindak kejahatan lintas identitas, terutama etnis. Tindak kejahatan lintas-etnis dipahami sebagai bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap etnis korban, sehingga penanganannya tidak bisa selesai hanya dengan menangkap pelaku kemudian diproses secara hukum. Bentuk penanganannya harus berjalan secara simultan antara proses hukum formal-negara dengan proses hukum adat masyarakat setempat. Proses hukum formal-negara untuk menghentikan kejahatan, sedangkan proses hukum adat untuk menormalisasi kondisi sosial dan relasi yang rusak akibat tindakan kejahatan yang terjadi. Polisi dan pengadilan menghukum pelaku dengan asumsi, menjalankan tugas, sehari-hari tidak hidup bersama pelaku maupun korban, tidak ada relasi personal, tidak kenal dengan pelaku maupun korban, sedangkan seorang tokoh adat menjalankan perannya karena karisma dan kepercayaan masyarakat. Dia harus menyelesaikan persoalan pada orang-orang yang sehari-harinya dia kenal, bahkan mungkin masih ada hubungan kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban. Selain itu dia harus mempertemukan orang yang sehari-harinya hidup berdampingan, saling kenal, antara pelaku maupun korban, termasuk keluarganya masing-masing. Dengan demikian penyelesaian seorang tokoh adat langsung mengacu pada upaya normalisasi relasi sosial, sedangkan penyelesaian hukum formal-negara terkait dengan tindakan kejahatan semata.

Ketiga, membangun perdamaian pasca konflik memang bertumpu pada kesadaran pihak-pihak yang bertikai, dalam pengertian, semangat pihak-pihak yang bertikai menjadi spirit atau jiwa dari upaya damai yang dilakukan. Namun itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak membutuhkan keterlibatan pihak lain, seperti keterlibatan para aktor rekayasa misalnya. Mereka tetap membutuhkan keterlibatan pihak lain, terutama untuk memobilisasi dan menyebarluaskan gagasan damai dan mendorong tumbuhnya sikap saling membutuhkan dan saling melengkapi di antara mereka. Hanya catatan yang harus diperhatikan adalah para aktor

rekayasa adalah fasilitator, bukan pengambil keputusan, karena yang berhak mengambil keputusan adalah pihak-pihak yang bertikai.

Kenyataan pasca konflik Sambas menunjukkan bahwa para aktor rekayasa justru terjebak pada pemahaman, “yang berperan mengusung gagasan damai pasca konflik adalah pihak-pihak yang bertikai”. Akibatnya para aktor rekayasa, mulai dari pemerintah sampai masyarakat biasa yang menghendaki damai praktis tidak berbuat apa-apa. Mereka selalu dihantui ketakutan; takut massa Melayu marah dan menolak gagasan damai yang ditawarkan, takut massa Madura melakukan pembalasan kalau diizinkan kembali ke Sambas. Singkatnya, mereka takut gagasan damai yang ditawarkan tidak diterima, bahkan memancing pertikaian atau konflik baru. Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan untuk menggagas perdamaian, tetapi hasilnya hanya berhenti di ruang pertemuan. Padahal sesungguhnya pihak Melayu hanya mempertahankan *gengsi* untuk mengakui secara jujur bahwa mereka membutuhkan kehadiran orang Madura, dan sebaliknya pihak Madura enggan mengakui bahwa tanah pertanian di Kabupaten Sambas sangat subur dan cocok untuk pola hidup mereka sebagai petani. Potensi ini tidak dimanfaatkan para aktor rekayasa untuk melancang perdamaian. Mereka hanya menunggu proses alamiah atau kesadaran internal pihak-pihak yang bertikai untuk berdamai.

Keempat, salah satu persoalan pelik pasca konflik adalah keinginan untuk balas dendam dan tidak mampu untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Karena persoalan ini terkait dengan psikologi manusia, dalam pengertian, terjadi ketidakseimbangan antara beban masa lalu dengan tantangan masa depan, maka dibutuhkan konsep psikologi untuk merekayasa dan selanjutnya merelakan pengalaman pahit itu lewat. Untuk itu dibutuhkan konsep atau pemahaman berkaitan dengan rekayasa pengalaman traumatik seperti dijelaskan sebelumnya (*lih. bab 5: empat pendekatan rekayasa pengalaman traumatik*). Pengalaman traumatik adalah beban masa lalu yang memberatkan langkah menuju masa depan yang tidak

pasti. Rantai beban masa lalu harus diputuskan, karena apa yang telah terjadi tidak mungkin ditarik kembali, dan selanjutnya melangkah ke masa depan yang penuh tantangan. Semua ini hanya bisa dilakukan kalau ada pemahaman yang sungguh-sungguh terhadap tindakan “memaafkan” dan “berjanji”. “Memaafkan” berkaitan dengan upaya memutuskan rantai beban masa lalu; satu-satunya cara untuk merelakan masa lalu itu lewat. Sedangkan “berjanji” berkaitan dengan upaya merancang masa depan yang tidak pasti. Satu-satunya kepastian tentang masa depan adalah kedua belah pihak berpegang janji, karena janji memberikan harapan dan semangat baru untuk membangun masa depan. Tindakan memaafkan dan berjanji terkait satu dengan yang lain, bahkan tidak bisa dipisahkan. Ketika orang rela memaafkan maka ia harus terikat pada janji, baik pada diri sendiri maupun pada orang yang menerima janji; demikianpun sebaliknya. Ini berarti, maaf tidak sekadar ritual-seremonial, bersalaman, berpelukan, menangis, dsb, tetapi sungguh-sungguh terikat pada janji untuk merelakan masa lalu dan membangun masa depan secara bersama-sama.

Untuk melakukan ini dibutuhkan vasilitasi dari para aktor rekayasa, karena pihak yang bertikai sedang berada pada posisi terhimpit, antara beban masa lalu dan tantangan membangun masa depan yang tidak pasti. Pasca konflik Sambas, sejak tahun 1999 sampai sekarang, upaya para aktor rekayasa masih sebatas tindakan seremonial dari memaafkan dan berjanji. Selesai pertemuan damai, para wakil dari pihak-pihak yang bertikai bersalaman, berpelukan, dan menangis menyesali apa yang telah terjadi. Mereka nampaknya tidak memiliki konsep, bagaimana mengimplemtasikan tindakan seremonial itu. Akibatnya, gagasan damai yang indah bagaikan “macan ompong” yang tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menata kembali kerusakan sosial akibat konflik 1999 yang lalu.

Kelima, Kalimantan Barat adalah proyeksi masa depan Indonesia, terutama berkaitan dengan bagaimana mengelola perbedaan kepentingan identitas. Beragama identitas, baik etnis, agama, suku, adat-istiadat, bahasa maupun status sosial dan aliran politik yang terdapat

di negeri katulistiwa ini merupakan representasi dari kemajemukan identitas di Indonesia secara umum. Untuk daerah-daerah di luar Kalimantan Barat, dirasakan dan diakui adanya kemajemukan itu, tetapi sebagian besar hampir tidak mempunyai pengalaman konflik dan bagaimana jatuh bangun mengelolah konflik untuk selanjutnya membangun perdamaian secara bersama-sama. Akibat seringkali wilayah Kalimantan Barat dilanda konflik (sejak tahun 1952 – 2003 telah terjadi 18 kali konflik), masyarakat perlahan-lahan menyadari bahwa setiap kelompok masyarakat yang diikat oleh identitas tertentu berharga dan bernilai. Maka tidak seorang pun berhak melecehkan, karena pelecehan berakibat pecahnya konflik dan itu berarti menghancurkan semua impian dan harapan. Jika terjadi tindakan kejahatan lintas-etnis, lintas-agama dan lintas-suku jangan pernah dikembangkan menjadi isu etnis, agama atau suku. Karena tindakan itu memancing amukan massa yang menghancurkan semua pihak. Kesadaran-kesadaran seperti ini merupakan modal utama untuk membangun masyarakat pluralis di masa depan. Berbeda tapi bisa hidup bersama, berkonflik tapi akhirnya bisa menciptakan perubahan.

6.2. PENUTUP

Semua ide dan gagasan yang muncul dalam tulisan ini membutuhkan kajian lebih lanjut, baik melalui verifikasi data lapangan maupun pendalaman gagasan. Penulis tidak berambisi mengklaim bahwa apa yang dihasilkan ini sempurna dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sebatas yang penulis ketahui dan pahami, inilah hasil elaborasinya. Gagasan dasar bahwa konflik bisa menjadi instrumen afirmasi perbedaan identitas dalam masyarakat pluralis dengan asumsi terjadi proses transformasi dan rekayasa sosial pasca konflik ternyata tidak semuanya terbukti. Ada proses menuju tahap afirmasi identitas, tetapi kurang mendapat validasi dari para aktor rekayasa, sehingga terkadang berjalan di tempat. Terdapat potensi pada pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai tahap afirmasi, tetapi kurang

dimanfaatkan para aktor rekayasa. Di masa yang akan datang pihak-pihak yang bertikai pasti bisa mencapai tahap afirmasi, namun membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu proses yang terjadi sekarang diharapkan bisa dikembangkan pihak-pihak yang bertikai melalui bantuan tangan-tangan para aktor rekayasa.

Tulisan ini hanya mencoba membuka kemungkinan jalan-jalan yang bisa dilalui pihak-pihak yang bertikai untuk membangun masa depannya secara bersama-sama. Jalan-jalan ini akan tertutup dan tidak mencapai tujuannya kalau terjadi konflik susulan yang kembali menarik pihak-pihak yang bertikai untuk memulai proses damai dari titik nol. Kemungkinan untuk terjadi konflik susulan tetap terbuka, terutama kalau pemerintah dan para aktor rekayasa lainnya tidak mengambil peran mengimplementasikan gagasan damai melalui strategi-strategi, yang diantaranya ditawarkan dalam tulisan ini. Strategi-strategi yang ditawarkan harus tetap memperhatikan kemampuan implementatif dari pihak-pihak yang pernah bertikai. Hanya dengan demikian, strategi yang ditawarkan akan nampak fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kepentingan pihak yang bertikai.

Lebih dari itu para aktor rekayasa perlu meninggalkan sikap apriorinya bahwa pihak yang bertikai tidak akan menerima konsep damai yang ditawarkan. Konsep damai yang ditawarkan dan langsung diarahkan pada subyek sasaran kemungkinan besar bisa gagal karena terkesan menyuruh pihak yang bertikai untuk merubah sikap dan tindakannya. Padahal pihak yang bertikai tidak ingin melakukan tindakan yang bertentangan dengan hasrat hatinya untuk memusuhi dan dihimpit pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Rekayasa sosial justru menghindari sasaran langsung gagasan damai. Rekayasa sosial menggunakan medium lain untuk menekan dan memaksa, misalnya melalui penghentian pemberian fasilitas sosial dan ekonomi atau memanfaatkan kondisi saling membutuhkan di antara pihak-pihak yang bertikai. Mereka saling membutuhkan tetapi malu mengungkapkannya secara jujur karena akan kembali mendegradasi harga diri yang telah mereka diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Peter dan Krueger, Christopher. 1994. *Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century*. Westport. Connecticut. Praeger: London.
- Azar, Edward, 1991, *The Analysis And Management of Protracted Social Conflict*, Aldershot, in Volkan, Montville an Julius
- Bornschiefer, Volker dan Chase-Dunn, Christopher. 1999. *The Future of Global Conflict*. International Sociological Association. Sage: London
- Beissinger, Mark R. 1997. *The Relentless Pursuit of the Nation State: Reflection on Soviet and Post-Soviet Experiences*. Dalam W.A. van Horne (ed.). *Global Convulsion: Race, Ethnicity and Nationalism at the End of the Twentieth Century*. Albany: State University of New York Press.
- Brown, E. Michael dan Rosecrance. Richard. 1999. *Comparing Costs of Prevention and Costs of Conflict: Toward a New Methodology*. Dalam Brown, E. Michael dan Rosecrance. Richard. (eds.). 1999. *The Costs of Conflict: Prevention and Care in the Global Arena*. Rowman & Littlefield. Lanham. Boulder: New York. Oxford
- Bamualim, S. Chaider dan Helmanita, Karlina. (Ed.). 2002. *Communal Conflicts in Contemporary Indonesia*. Pusat Bahasa dan Budaya IAIN Jakarta kerja sama dengan The Konrad Adenauer Foundation: Jakarta. Indonesia
- Bercovitch, Jacob. 1997. *Mediation in International Conflict: An Overview of Theory, An*

- Overview of Practice. Dalam Zartman, I.W. dan Lewis, J. (eds.). 1997.
 Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques. Washington ,
 D.C: United States of Peace Press
- Chazan, Naomi. 1994. *Engaging the State: Associational Life in Sub-Saharan Africa*. Dalam
 J.S. Migdal, et.al. (eds.). *State Power and Social Forces: Domination and
 Transformation in the Third World*. Cambridge: Cambridge University Press
- Dahrendorf, Ralf. 1988. *The Modern Social Conflict: Essays on the Politics of Liberty*. London:
 Weidenweld and Nicolson
- D'Enteves, Passerin, Maurisio, 2003, *Filsafat Politik Hanna Arendt*, M. Shafwan (penejemah),
 Qalam: Yogyakarta
- Fisher, Simon, cs. 2001. *Mengelola Konflik: Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Dalam
 Kartikasari, S.N. (penyunting.). The Beritish Council. Indonesia: SMK Grafika
 Desa Putra
- Fisher, Ronald J. 1997a. *Interactive Conflict Resolution*. New York: Syracuse University Press
 -----, 1997b. *Interactive Conflict Resolution*. Dalam Zartman. I.W. dan Lewis J.
 (eds.). 1997. *Peacemaking in International Conflict: Methods and
 Techniques*. Washington, D.C.: United States of Peace Press
- Giddens, Anthony. 1985. *The Nation-State ang Violence*. Cambridge: Polity Press
- Gray, Hables, Chris. 1997. *Postmodern War: The New Politics of Conflict*. London: Routledge
- Harris, John. 1995. *The Politics of Humanitarian Intervention*. London and New York: Pinter
 Publisher
- Hadiwinata, S. Bob. 2002. *Manajemen dan Resolusi Konflik*. (Bahan Kuliah Pasca-Sarjana
 Fisip Unpar)
- Houweling, Henk W. 1996. *Destabilising Consequences of Secquential Development*. Lun

- van de Goor, et.al. (eds.). *Between Development and Destruction: An Inquiry into the Causes of Conflict in Post-Colonial States*. London: MacMilan
- Huntington, P. Samuel. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster, New York
- Hardiman, Budi Fansisco dan Leksono-Supelli, Karlina, 2001, *Etika Politik Dalam Konteks Indonesia*, Eddy Kristanto (ed.), Kanisius: Yogyakarta
- , 2002, *Bentara Esai-esai 2002*, JB. Kristanto, dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), Kompas: Jakarta
- Hardiman, Budi Fansisco, 2003, *Bentara Esai-esai 2003*, Bre Redana, JB. Kristanto, dan Nirwan Ahmad Arsuka (ed.), Kompas: Jakarta
- Institut Studi Arus Informasi dan Institute Dayakologi Research and Development, 1999, *Sisi Gelap Kalimantan Barat: Perseteruan Etnis Dayak-Madura 1997*, PT. Midas Surya Grafindo: Pontianak, Kalimantan Barat
- Jandt, Fred E dan Pederses, Paul B (eds.). 1996. *Constructive Conflict Management: Asia-Pacific Cases*. London: Sage
- Kokole, Omari H. 1996. *Etnic Conflict Versus Development in Africa: Causes and Remedies*". Dalam Lac van de Goor, et.al. (eds.). *Between Development and Destruction: An Inquiry into the Cause of Conflict on Post-Colonial State*. London: MacMilan
- Krisberg, Louis. 1997. *The Development of the Conflict Resulation Field*. Dalam Fiher, Ronald J. 1997. *Interactive Conflict Resulation*. New York: Syracuse University Press
- Lefebve, Michel. 1998. *NGOs and Reconstruction in Rewanda*. Dalam Ann L. Griffiths (ed.). *Building Peace and Democracy in Post-Conflict Societies*. 1998. Centre for

- Foreign Policy Studies, Dalhousie university, Canada
- Lissenko, Mikhail. 1998. *Civil Society in Rusia in the Process of Democratisation*. Dalam Ann L. Griffiths (ed.). *Building Peace and Democracy in Post-Conflict Societies*. 1998. Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, Canada
- Maclean, Sandra J. 1998. *Contributions from Civil Society to Building Peace and Cemocracy*. Dalam Ann L. Griffiths (ed.). *Building Peace and Democracy in Post-Conflict Societies*. 1998. Centre for Foreign Policy Studies, Dalhousie University, Canada
- McGarry, J. dan O'Leary, B. 1993. *Introduction: the Macro-Political Regulation of Ethnic Conflict*. Dalam J. McGarry dan O'Leary (eds.). *The Politics of Ethnic Conflict Regulation*. London: Routledge
- , 1996. *Eliminating and Manageing Ethnic Differences*: Dalam J. Hutchinson dan A.D. Smith (eds.). *Ethnicity*. Oxford: Oxford University Press
- McGoldrick, Annbel dan Jake Lynch. 2002. *Jurnalisme Damai: Bagaimana Melakukannya ?*, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) dan The British Council, Jakarta
- Maill, Hugh, et.al. 1999. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity Press
- Mitchell, Chiris, 1981, *The Structur if International Conflict*, MacMilan, London. Bab I dalam Fisher, Simon, et.al., *Mengelolah Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*, 2001, The British Council, Indonesia,; S.N. Karikasari, et.al
- Miden, S Maniamas, 1999, *Dayak Bukit: Tuhan, Manusia, dan Budaya*, Institut Dayakologi, Pontianak
- Noel, S.J.R. 1993. *Canadian Responses to Ethnic Conflict*. J. MacGaerry dan B. O'Leary (eds.). *The Politics of Etnic Conflict Regulation*. London: Routledge

- Naisbitt, John. 1994. *Global Paradox*. William Morrow and Company, Inc: New York
- O'Duffy, Brendan. 1993. *Containment or Regulations. The British Approach to Ethnic Conflict in Northern Ireland*: Dalam J. MacGaerry dan B. O'Leary (eds.). *The Politics of Ethnic Conflict Regulation*. London: Routledge
- Olzak, Susan. 1992. *The Dynamics of Ethnic Conflict Competition and Conflict* Stanford: Stanford University Press
- Petebang, Edi, 1996/97, *Dayak Sakti: Ngayau Tariuh, Mangkok Merah dalam Konflik Etnis di Kalimantan Barat*, Institut Dayakologi
- Rasmunssen, J. L. 1997. *Peacemaking in the Twentieth Century: New Rules, New Roles, New Actors*. Dalam Zartman, I.W. dan Lewis J. (eds.). 1997 *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*. Washington, D.C.: United States of Peace Press
- Remington, Robin A. 1997. *Ethnonationalism and the Disintegration of Yugoslavia*. Dalam W.A. van Horne (ed.). *Global Convulsions: Race, Ethnicity and Nationalism at the End of the Twentieth Century*. Albany: State University of New York Press
- Ross, Marc H. 1993. *The Management of Conflict: Interpretation and Interests in Comparative Perspective*. New Haven and London: Yale University Press
- Rupesinghe, Kumar. 1998. *Civil War, Civil Peace: an Introduction to Conflict Resolution*. London: Pluto Press
- Ryan, Stephen. 1995. *Ethnic Conflict and International Relations* 2nd edition. Vermont: Dartmouth Publishing Company
- Ramezanzadeh, Abdollah, 1996, *Internal and International Dynamics of Ethnic Conflict: The Case of Iran*, Katholieke Universiteit Leuven

- Sihbudi, Rizal dan Nurhasim, Moch. 2001. *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus*
Kupang, Mataram, dan Sambas. Hasil Kerja sama. PT. Grasindo, Kantor
Menteri Negara Riset dan Teknologi RI dan LIPI
- Steger, B. Manfred dan Lind, S. Nancy. (Ed). 1999. *Violence and its Alternatives: An
Interdisciplinary Reader*. New York. St Martin's Press
- Stavenhagen, Rodolfo, 1990, *The Ethnic Question; Conflicts, Development, and Human
Rights*, United Nations University Press
- Sudagung, Suroyo, Hendro, 2001, *Mengurai Pertikaian Etnis: Migrasi Swakarsa Etnis Madura
ke Kalimantan Barat*, Institut Studi Arus Informasi kerja Sama dengan
Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, Yogyakarta
- Wink, Walter. (Ed.). 2000. *Peace is the Way: Writings on Nonviolence from the Fellowship of
Reconciliation*. Orbis Books. Maryknoll, New York
- Zartman, I. W. 1997. *Toward the Resolution of International Conflict* . Dalam Zartman, I.W.
dan Lewis J. (eds.).1997. *Peacemaking in International Conflict: Methods
and Techniques*. Washington, D.C.: United States of Peace Press
- Zartman, I.W.dan Lewis J. (eds.).1997. *Peacemaking in International Conflict: Methods and
Techniques*. Washington, D.C.: United States of Peace Press

Bahan Kuliah

- Bob S. Hadiwinata, *Konflik dalam Perspektif Teoretis dan Historis*, bahan kuliah Kajian
Strategis dan Perdamaian, semester genap, 2002, Program Pasca-Sarjana,
Fisip, Unpar
- , *Tipologi dan Sumber-sumber Konflik*, bahan kuliah Kajian Strategis dan
Perdamaian, semester genap, 2002, Program Pasca-Sarjana, Fisip,

Unpar

-----, *Dimensi Politik Konflik Primordial*, bahan kuliah Kajian Strategis dan Perdamaian, semester genap, 2002, Program Pasca-Sarjana, Fisip, Unpar

Laporan Dokumentasi

- Balai Kajian dan Nilai Tradisional Pontianak, *Kerusuhan Sosial di Kabupaten Sambas*, Propinsi Kalimantan Barat, (Kliping Berita dan Artikel), 1989 –1999
- Kabupaten Sambas Dalam Angka*, Kerja sama Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas, Sambas, 2001
- Kerusuhan Antar Etnis 1999 di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat*, (Dokumen Kliping), Pelaksana Informasi dan Dokumentasi Lembaga Bela Banua Talino, Pontianak, 1999
- Kasus Kalimantan Barat*, (Jasa Kliping Institute of Dayakologi Research and Development), Sumber: Harian Akcaya dan The Jakarta Post, Januari – Juni 1997, Pontianak 1997
- Menyatukan Langkah Menegakkan Kedaulatan Masyarakat Adat: Catatan Singkat Tentang Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, Rumah AMAN, 2001
- Andreas B. Tangdililing, *Perkawinan Antar Suku Sebagai Salah Satu Wahana Pembauran Bangsa*, (Disertasi Doktor di Universitas Indonesia), Jakarta, 1993
- Bidang Lahcahwilis, *Perekonomian Kalimantan Barat 1993*, Kantor Statistik Propinsi Kalimantan Barat, 1995
- Pemerintah Kabupaten Sambas, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Semparuk*, (Contoh), Sambas, 2003
- Penduduk Kalimantan Barat Hasil Sensus Tahun 2000*, (Seri: L2.2.19), Badan Pusat Statistik,

Jakarta, 2000

Kerusuhan 1997 di Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat,

(Dokumentasi Kliping Koran), Pelaksana Informasi dan Dokumentasi Lembaga

Bela Banua Talino, Pontianak, 1997

Pendeta Agus F. Manupessy, *Konflik Ambon*, Jilid I, IV, dan IX (Kumpulan Kliping Koran),

Ambon, 1999 – 2001

Makalah Seminar dan Surat Kabar

Julia I. Suryalakusuma, *Religi Sebagai Identitas dan Spiritualitas*, Makalah disampaikan

dalam seminar sehari, kerja sama Unpar dan Fak. Filsafat Unpar, Bandung,

Mei, 1995

Nurcholish Madjid, *Persoalan Makna Hidup Bagi Manusia Modern*, Makalah disampaikan

dalam seminar di Fak. Filsafat Unpar, Bandung, Desember, 1994

A. Suryawasita, SJ, *Analisis Sosial*, Makalah disampaikan dalam Workshop karyawan RS.

Boromeus, Bandung, September, 1996

Irwan Abdullah, *Resolusi Konflik Etnis di Indonesia: Suatu Kerangka Konseptual*, Makalah

disampaikan dalam Workshop Resolusi Konflik di Sumatera Utara,

dilaksanakan oleh Ethnic Conflict Resolution Studies Network (ECRSN),

Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, Medan, 8-9 Maret 2002

Francisco Bdi Hardiman, *Faktor-Faktor Kekerasan: Sebuah Perspektif Sosio-Antropologi*,

Makalah disampaikan dalam EC Filsafat di Fak. Filsafat Unpar, Bandung,

Oktober 2002

Yulia Sugandi, *Conflict Management in West Kalimantan*, Makalah disampaikan dalam

Workshop, Jaringan Studi Konflik Indonesia yang merupakan kerja sama

- UNPAR, Bandung dan NIAS, Copenhagen, di Bandung, Agustus, 2002
- Syarif Alkadrie, *The Pattern of Conflict in Kalimantan and Its Influencing*, Makalah disampaikan dalam Workshop, Jaringan Studi Konflik Indonesia yang merupakan kerja sama UNPAR, Bandung dan NIAS, Copenhagen, di Bandung, Agustus, 2002
- Anak Agung Banyu Perwita, *Islam International Community and Conflict in Indonesia*, Makalah disampaikan dalam Workshop, Jaringan Studi Konflik Indonesia yang merupakan kerja sama UNPAR, Bandung dan NIAS, Copenhagen, di Bandung, Agustus, 2002
- Selo Soemardjan, *Konflik Antarsuku di Indonesia*, Kompas, 22 Maret 2001
- Farsijana Adeney-Risakotta, *Mobilising Conflict through Media in the North Moluccas*, Makalah Workshop: Conflict and Media Analysis and Conflict De-escalating Radio Programming in Indonesia, kerja sama Indonesia Conflict Studies Network/UNESCO Local Radio Network/International Media Suport/Embassy of Finland, Unpar – Bandung, Indonesia, 7-12 April 2003
- PT. Mitra Jeruk Lestari, *Rekonstruksi Sistem Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pengembangan Komoditas Jeruk dengan Pola Kemitraan*, Makalah dipresentasikan dalam Semiloka Perjerukan Nasional di Pontianak, 9 –12 Juni 2003
- Iqbal Djajadi, *Tranformasi Konflik di Kalimantan Barat*, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Sehari Membangun Perdamaian di Kalimantan Barat, Diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak, 7Juli 2003

